

Implementasi Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi pada SMA Negeri 1 Cikande

Dessy Gita Kisnawati¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
6661190144@untirta.ac.id

Riswanda²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
riswanda@untirta.ac.id

ABSTRACT

The problem in this research is related to the implementation of accepting new students through the zoning route at SMAN 1 Cikande which is still facing various obstacles. These obstacles include a lack of outreach to the community, inadequate facilities, age limits that prevent prospective students who live near schools from being accepted, unclear acceptance radius, as well as unequal distribution between state schools and the calculation of the number of school-aged children in the area. , especially in Cikande District. The aim of this research is to directly observe the implementation of student admissions through the zoning route at SMAN 1 Cikande. This research uses a Critical Systems Thinking approach by utilizing four indicators from George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and organizational structure. It is hoped that the results of this research can become a reference for stakeholders to evaluate the extent to which student admission policies through the zoning system provide impacts and benefits for society. Apart from that, it is also hoped that these findings will become evaluation material to improve these policies in the future, for the sake of educational progress in Indonesia. The research results show that the implementation of the PPDB Zoning policy at SMAN 1 Cikande has not been optimal due to a lack of technical outreach to the community, an imbalance between school capacity and the number of registrants, as well as the community's limitations in mastering information technology.

Keywords: Implementation, PPDB, Zoning System

LATAR BELAKANG

Kebijakan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada suatu waktu tertentu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa. Proses pengambilan kebijakan ini melibatkan banyak pertimbangan, dan implementasinya bertujuan menyediakan sarana untuk

menciptakan dampak tertentu. Secara sederhana, implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan aturan menjadi tindakan nyata (Agustino, 2017, hlm. 126).

Dalam upaya membangun masa depan bangsa yang lebih baik, pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Kebijakan di bidang pendidikan termasuk dalam kategori kebijakan pembangunan sosial karena memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat suatu negara. Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan di masa mendatang. Pendidikan, baik formal maupun informal, adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2021/2022 mencapai 24,33 juta orang. Data ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan sistem penerimaan peserta didik baru agar kualitas pendidikan dapat merata. Karena pendidikan berperan besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk kebijakan sistem zonasi yang diterapkan sejak 2018.

Sistem zonasi adalah kebijakan penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dari sekolah. Kebijakan ini diatur dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mencakup empat jalur utama, yaitu jalur prestasi, perpindahan orang tua, afirmasi, dan zonasi. Penelitian ini berfokus pada jalur zonasi karena jalur ini kerap menimbulkan polemik di lapangan. Sejak diterapkan pada 2018, kebijakan zonasi menuai berbagai pro dan kontra, meskipun telah mengalami sejumlah perubahan dan evaluasi. Beberapa persoalan utama dalam pelaksanaan kebijakan zonasi adalah persepsi orang tua yang menganggap sekolah negeri favorit memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sekolah lain, serta keluhan mengenai sistem pendaftaran yang dianggap rumit. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal kebijakan zonasi, yaitu menghapus konsep sekolah favorit dan menciptakan pemerataan fasilitas pendidikan. Selain itu, keterbatasan daya tampung sekolah juga menjadi masalah yang sering muncul dalam implementasi kebijakan ini.

Salah satu contoh masalah dalam penerapan kebijakan zonasi terjadi di SMAN 1 Cikande, Kecamatan Cikande. Pada tahun 2022, sekolah ini memiliki daya tampung sebanyak 432 siswa, namun jumlah pendaftar yang terverifikasi melalui jalur zonasi sudah mencapai 434 siswa. Jumlah ini belum termasuk siswa yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Di sisi lain, Kecamatan Cikande memiliki sekitar 9.237 anak usia sekolah dalam rentang usia 15-19 tahun yang ideal untuk jenjang SMA. Jalur zonasi membatasi cakupan wilayah penerimaan siswa maksimal 1,4 km, sedangkan kecamatan ini memiliki luas wilayah 45,96 km² dengan 13 desa. Kondisi ini memunculkan polemik karena hanya ada satu SMA negeri di Kecamatan Cikande, yang belum mampu menampung 10% dari total anak usia sekolah dengan wilayah yang begitu luas.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan kawasan industri berkembang dengan banyak pendatang dan pencari kerja. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Serang meningkat dari 1.538.300 jiwa pada 2018 menjadi 1.622.630 jiwa pada 2020. Kecamatan Cikande menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Serang, yaitu dari 98.526 jiwa pada 2018 menjadi 110.569 jiwa pada 2020. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya kebutuhan pendidikan. Pada tahun 2020, jumlah anak usia sekolah di Kecamatan Cikande, mulai dari jenjang SD hingga SMA, mencapai sekitar 30.000 orang, menjadikan kecamatan ini sebagai wilayah dengan jumlah anak usia sekolah tertinggi di Provinsi Banten. Meskipun Kecamatan Cikande memiliki 91 sekolah negeri dan swasta dari jenjang TK hingga SMA, masih terdapat berbagai polemik terkait kebijakan zonasi. Hanya terdapat satu SMA negeri di kecamatan ini, sehingga tidak mampu menampung seluruh anak usia sekolah yang tinggal di wilayah tersebut melalui jalur zonasi. Banyak masyarakat mengeluhkan kesulitan dalam proses pendaftaran, kurangnya informasi, serta minimnya penguasaan teknologi. Kurangnya sosialisasi, sulitnya prosedur pendaftaran, dan ketidakjelasan terkait penghitungan jarak dalam zonasi membuat masyarakat merasa kebijakan ini tidak efektif dan terlalu rumit.

Beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi antara lain: masih adanya persepsi mengenai kesenjangan kualitas antara sekolah favorit dan non-favorit, serta ketidakjelasan dan ketidakakuratan dalam penentuan jarak penerimaan siswa. Selain itu, celah dalam sistem PPDB ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga membuka peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi. Proses pendaftaran ke sekolah negeri sering kali dianggap sulit karena minimnya sosialisasi yang diberikan kepada siswa maupun orang tua. Selain itu, data anak usia sekolah di wilayah tertentu sering kali kurang valid dan kurang diperhatikan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah anak usia sekolah dan daya tampung sekolah. Masalah ini semakin diperparah dengan ketimpangan antara jumlah sekolah dan cakupan wilayah dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena dilatarbelakangi oleh kebijakan PPDB yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang mengacu pada buku Winarno (2016: 155), yang menyebutkan empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMAN 1 Cikande, peneliti menerapkan pendekatan *Critical Systems Thinking*. Pendekatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara konseptualisasi yang terlalu abstrak dengan realitas faktual yang berlebihan, serta menyeimbangkan

perspektif *etic* (pandangan luar) dan *emic* (pandangan dalam). Pendekatan ini juga digunakan sebagai dasar untuk menerapkan teori Edward sebagai kerangka analisis utama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dipilih untuk menggali dan menyajikan fakta secara komprehensif, seperti dokumen, wawancara dengan pihak terkait, serta data lain yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merefleksikan *boundary judgment* dengan menghubungkan fakta, nilai norma, dan sistem secara integratif sesuai teori yang digunakan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan perbandingan variabel dengan sampel lain, melainkan berfokus pada variabel mandiri. Metode kualitatif digunakan untuk mengamati berbagai fenomena dan kendala yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Permendikbud RI No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMAN 1 Cikande. Kebijakan ini dirancang untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan mengatur PPDB berbasis zonasi.

Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini belum berjalan optimal karena distribusi sekolah yang belum merata sesuai dengan jumlah anak usia sekolah di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat perbedaan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan di pelosok. Banyak siswa yang ingin mendapatkan fasilitas dan pengajar terbaik harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bersekolah di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Dalam konteks SMAN 1 Cikande, peta zonasi yang kurang jelas menyebabkan beberapa masyarakat lokal tidak dapat mengakses pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan sistem PPDB zonasi, sehingga setiap anak di Indonesia, termasuk yang berada di pelosok, dapat menikmati hak pendidikan yang setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan alur komunikasi yang baik. Ketidaksesuaian informasi dalam proses komunikasi dapat berujung pada kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, semua pelaksana kebijakan harus memahami, menguasai, dan mengetahui secara jelas tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks PPDB tingkat SMA di Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bertanggung jawab untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh unit pelaksana, termasuk SMAN 1 Cikande sebagai salah satu penyelenggara PPDB. Selanjutnya, pihak SMAN 1 Cikande bertugas meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Namun, peneliti menemukan beberapa kendala dalam sosialisasi kebijakan ini. Sosialisasi PPDB SMA tidak dilakukan secara

langsung kepada masyarakat, melainkan melalui kepala sekolah masing-masing SMP asal siswa. Informasi hanya disampaikan melalui spanduk di depan sekolah dan pamflet di situs resmi sekolah, seperti di <http://ppdb.sman1cikande.sch.id/>.

Selain itu, terkait jarak zonasi, tidak ada patokan resmi yang dijadikan acuan, dan keputusan sepenuhnya diserahkan pada sistem, sehingga sekolah tidak memiliki wewenang untuk menentukan jarak terjauh dalam penerapan zonasi. Petunjuk teknis juga tidak disebarkan secara langsung kepada masyarakat; mereka hanya diberikan informasi terkait tata cara pendaftaran. Petunjuk teknis ini hanya sampai pada tingkat sekolah penyelenggara, tanpa melibatkan masyarakat secara lebih luas. Sumber daya dalam konteks ini mencakup sumber daya manusia, sarana pendukung, dan kualitas layanan, yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Dimensi sumber daya menjadi elemen vital karena berfungsi sebagai penggerak utama suatu program. Jika sumber daya yang tersedia tidak memadai, maka pelaksanaan program akan terhambat dan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Di SMAN 1 Cikande, sumber daya manusia meliputi panitia PPDB yang terdiri dari guru dan staf internal sekolah dengan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Mereka mendapatkan pelatihan terkait PPDB sebanyak tiga kali untuk memastikan kesiapan teknis. Tim ini terdiri dari tujuh operator, satu ketua pelaksana, dan satu operator utama yang bertugas mengoordinasikan seluruh operator lainnya di server PPDB. Pemilihan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sarana pendukung yang disediakan meliputi komputer dengan teknologi mutakhir, jaringan internet yang stabil, dan server PPDB yang andal dari PT. Telkom Indonesia. Selain itu, SMAN 1 Cikande juga memiliki tenaga pengajar berkualitas, yang berkontribusi pada upaya pemerataan mutu pendidikan dan mengurangi stigma terkait sekolah favorit atau non-favorit. Fasilitas sekolah yang memadai juga menjadi salah satu indikator untuk menunjang proses pembelajaran secara optimal. Dengan demikian, SMAN 1 Cikande dinilai telah siap melaksanakan PPDB untuk menampung seluruh siswa yang diterima sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana atau implementor kebijakan. Seorang implementor harus memiliki pengetahuan yang memadai serta sikap yang profesional dalam memberikan pelayanan. Di SMAN 1 Cikande, dengan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, tim pelaksana mampu membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam proses PPDB. Para pelaksana menunjukkan sikap ramah dan tulus dalam membantu masyarakat, meskipun membutuhkan waktu dan tenaga. Mereka membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti penentuan jarak menggunakan aplikasi *open camera*, melengkapi persyaratan dokumen yang kurang, hingga melakukan verifikasi data. Masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan merasa puas dengan sikap profesional dan kecakapan para operator dalam menangani permasalahan yang muncul selama proses PPDB. Hal ini

mencerminkan komitmen SMAN 1 Cikande dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Struktur birokrasi mencakup berbagai aspek, seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit di dalam organisasi, serta hubungan organisasi dengan pihak eksternal. Sebagai sebuah organisasi modern, birokrasi memiliki seperangkat aturan baku yang mengatur seluruh kegiatan kerja secara legal dan formal. Dalam pelaksanaan kebijakan, keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pedoman kebijakan menjadi elemen yang sangat penting. Di SMAN 1 Cikande, seluruh proses pelaksanaan PPDB dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Namun, pihak pelaksana kebijakan berupaya mengatasi kendala tersebut melalui evaluasi harian. Dengan evaluasi yang rutin, mereka berharap dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi di SMAN 1 Cikande telah mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya sosialisasi teknis kepada masyarakat, ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah pendaftar, serta rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan masyarakat. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator-indikator dari George Edward III, yang meliputi: Sosialisasi: Sosialisasi PPDB tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui kepala sekolah SMP asal. Sosialisasi terbatas pada spanduk yang dipasang di depan sekolah dan pamflet yang dipublikasikan di website sekolah (<http://ppdb.sman1cikande.sch.id/>). Mengenai jarak zonasi, tidak ada patokan resmi, karena sistem yang menentukan.

Sekolah tidak dapat menentukan jarak terjauh untuk PPDB zonasi, dan petunjuk teknis hanya diberikan kepada tingkat SMA, bukan kepada masyarakat umum. Sumber Daya Manusia (SDM): Panitia PPDB di SMAN 1 Cikande terdiri dari guru dan staf yang memiliki pengetahuan IT. Mereka diberikan pelatihan sebanyak tiga kali. Terdapat tujuh operator, satu ketua pelaksana, dan satu operator utama yang mengkoordinasi operator lain di server PPDB. SDM yang handal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan ini. Sarana yang disediakan termasuk komputer dengan teknologi terbaru, jaringan internet yang stabil, dan server PPDB yang didukung oleh PT. Telkom Indonesia. Disposisi: Implementor kebijakan dengan senang hati membantu masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Meskipun prosesnya memerlukan waktu, mereka secara tulus membantu masyarakat yang mengalami masalah dalam pendaftaran, menunjukkan

komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan Kebijakan: SOP kebijakan sangat penting dalam pelaksanaan PPDB. Di SMAN 1 Cikande, seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada. Struktur birokrasi yang baik terbukti mempengaruhi keberhasilan kebijakan, dan ketika menghadapi kendala, evaluasi segera dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta:CAPS
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Afabeta.
- Budi Sabar, Yufriawati, dkk. 2020. *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Huberman Michael, Matthew, dan Jonny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Singapore :SAGE
- Raharjo, dkk. 2020. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan .
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi di Lengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Purwadi. 2019. *Zonasi Pendidikan. Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi* ©2019 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
- Syahrur dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapusaka Media.
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik(teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.